

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (Agency Teory)

Teori agensi (Agency Teory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berasal dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama dari teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antar pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang yaitu (agency) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “nexus of contract”. Ahmad Elqorni(2009).

Teori keagenan mengasumsi bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi investasi mereka didalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Jesen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara 1 atau lebih Principal dengan menggunakan orang lain atau agen (manajer) dalam menjalankan suatu perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing sehingga memicu terjadinya konflik antara prinsipal dan agen. Anthony & Govindarajan (2005:269) berpendapat bahwa teori keagenan merupakan konsekuensi akibat adanya fungsi kontrol yang terpisah oleh manajemen atas fungsi kepemilikan yang dilakukan oleh pemegang.

2.2. Teori Perilaku (Planned Behavior Theory)

Planned Behavior Theory merupakan teori yang menjelaskan tentang sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang mampu/sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu mempertimbangkan sikap seseorang dalam menguji sikap perilaku/ norma subjektif serta mengukur control perilaku persepsian tersebut dan tidak akan sesuai apabila digunakan untuk menjelaskan perilaku yang tidak berada dibawah kendali individu dikarenakan terdapat faktor yang memungkinkan bisa mendukung atau menghambat untuk mewujudkan niat individu agar berperilaku. Oleh karenanya Ajzen dalam Theory of planned behavior (TPB) menambahkan satu faktor yaitu perceived behavior control (kontrol perilaku yang dirasakan). Menurut Wikamorys & Rochmach (2017) Theory of planned behavior merupakan suatu teori yang digunakan untuk memperkirakan tingkah laku seseorang, yang mana teori ini mempunyai dua asumsi utama untuk menilai niat seseorang dalam berperilaku, yaitu attitude toward the behavior (sikap terhadap perilaku) dan subjective norma (norma subjektif).

2.3. Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan dalam PSAK NO. 46, telah menerapkan metode akuntansi pajak penghasilan secara komprehensif dengan pendekatan aktiva dan kewajiban atau balance-sheet approach. Metode akuntansi pajak penghasilan yang akan berorientasi pada neraca mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer dan sisa kerugian yang belum dikompensasi.

Menurut (PSAK NO. 46, IAI, revisi 2010: paragraf 5), beban pajak (penghasilan pajak) terdiri atas beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan). Beban pajak

tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan (Sukrisno Sukrisno dan Estralita, 2010:244).

Laba fiskal untuk wajib pajak badan adalah laba kena pajak (Djoko dan Baruni, 2009:106). Dengan demikian diperoleh beban pajak kini dari Perkalian antara tarif pajak yang berlaku dengan laba kena pajak suatu perusahaan atau badan. Dalam beberapa hal, wajib pajak mempunyai kebebasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan akuntansi si yang yang yang berkaitan dengan penentuan saat pengakuan pendapatan dan biaya meskipun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan harus diterapkan secara taat asas atau konsisten dari tahun ke tahun (Lindira dan Ketut, 2014:251). Inilah yang menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba, menaikkan dan menurunkan laba perusahaan melalui pengakuan pendapatan dan beban untuk itu, perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*), yang berarti bahwa kenaikan utang pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak.

Sebaliknya, perbedaan temporer yang dapat mengurangi jumlah pajak masa depan akan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui sebagai keuntungan atau manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefit*) yang berarti kenaikan aktiva pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan mengakui biaya lebih awal Al atau menangguhkan pendapatannya untuk tujuan pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak (Phillips et al, 2002). Jadi dari aspek perpajakan rumah pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan titik pajak tangguhan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

a. Akun Aset

Aset pajak tangguhan adalah Jumlah pajak penghasilan (Pph) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya titik2 akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; perbedaan temporer yang bolong dikurangkan; dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan

b. Liabilitas

Liabilitas pajak tangguhan adalah Jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

2.4. Pajak Kini

Pajak kini (current tax) adalah Jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak jumlah pajak harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian juga sendiri dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak peraturan pemerintah (PP) nomor 4 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang atas jasa tertentu atas tenaga listrik sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (UU HKPD).

Menurut Suandy (2011), pajak kini (current tax) adalah jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi).

Lebih tidakan dari upaya manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Kompensasi dapat dikelompokkan berdasarkan 2 jenis yaitu kompensasi keuangan dan kompensasi non-keuangan. Kompensasi keuangan meliputi bonus, kenaikan gaji, surat-surat berharga, tunjangan, mobil, perjalanan liburan, keanggotaan klub dan sebagainya. Sedangkan kompensasi non-keuangan meliputi surat penghargaan, pujian, kenaikan jabatan/ promosi jabatan, kenaikan otonomi, lokasi geografis yang lebih baik dan lain-lain. Pembagian kompensasi ini meliputi:

- a. Kompensasi para pejabat kantor pusat.
- b. Kompensasi CEO
- c. Kompensasi para manajer unit bisnis bonus plan hipotesis dalam (Rehobot,2012:32) mengatakan bahawa manajemen memiliki metode akuntansi memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi .

Manajer perusahaan memberikan bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan . Jika perusahaan memiliki kompensasi (bonus scheme), maka manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untk dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima (Halima, 2009:6). Hal inilah yang memicu terjadinya manajemen laba yang digunakan oleh manajer perusahaan demi mencapai target laba sehingga memperoleh kompensasi atau bonus yang diinginkan. Jika kompensasi manajemen besar maka praktik manajemen laba besar serta sebaliknya.

2.5. Manajemen Laba

Scott (2009) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak uang dan political cots (Oportunistic Earnings Management), dimana manajemen melindungi laba memberi manajer suatu

fleksibel untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam menganalisis kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Untuk mengetahui ada tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atas akrual adalah sangat penting untuk diperhatikan. Karena akrual merupakan perbedaan laba dengan arus kas operasi. Semakin besar perbedaannya, maka perbedaan itu disebabkan karena aspek akrual atau kebijakan akuntansi. Laba dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi sedangkan arus kas operasional hanya berasal dari transaksi riil. Terdapat beberapa mode dalam perhitungan manajemen laba diantaranya:

1. Mode Healy

Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual (diskala dengan lag total aset) antara variabel yang merupakan bagian dari manajemen laba. Model Healy dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \frac{\sum(TA)_t}{T}$$

2. Model De Angelo

De Angelo (1986) menguji manajemen laba dengan memperhitungkan perbedaan pertama dalam total akrual, serta mengasumsi bahwa perbedaan pertama mempunyai suatu nilai ekspektasi nol dibawah hipotesis nol yaitu tidak adanya manajemen laba. *Nondiscretionary accrual* berdasarkan model De Angelo dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = TA_t - 1$$

3. Model Jones

Model Jones (1991) berusaha untuk mengontrol dampak perubahan ekonomi perusahaan terhadap *nondiscretionary accrual*. Model Jones untuk *nondiscretionary accrual* dirumuskan sebagai berikut:

$NDAt = a_1(1/At - 1) + a_2(\Delta REV_t) + a_3(PPEt)$ tingkat yang dapat diterima.

2.6. Dampak yang dipengaruhi pajakk tangguhann dann pajakk kini terhadaph manajemenn labaa.

Bebann Pajakk Tangguhann digunakan untuk mendeteksi manajemen laba karena adanya komponen-komponen beban pajak tangguhan yang dapat digunakan dalam tindakan manajemen laba oleh perusahaan. Salah satu cara beban pajak tangguhan untuk menghindari kerugian atau untuk meningkatkan angka laba seperti total perubahan kewajiban pajak tangguhan yang tercantum dalam laporan laba rugi, kecuali terkait dengan peristiwa merger, acquisition, dan divestiture dan other comprehensive income items menurut Yulianti (2005) menyatakan semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan harus berhati-hati dalam penggunaan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin besar presentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan mengindikasikan kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode. Besarnya dihitung dari penghasilan kena pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap sekaligus beda waktu, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak merefleksikan tingkay kebijakan manajer dalam manipulasi laba menjadi lebih tinggi (Mills dalam Ettredge et al, 2008), maka beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut (beda tetap dan beda waktu) digunakan pula melengkapi beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba.

Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan pajak, dalam hal ini adalah undang-Undang pajak penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Beda tetap/beda permanen (permanen difference) adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum kena pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.
2. Beda waktu/beda temporer (temporary difference) adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan pengakuan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Mills (2008) dalam Amanda & Meiriska Febrianti (2015) menjelaskan perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam membuat laba menjadi lebih tinggi maka beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut (beda tetap dan beda waktu).

2.7. Pengertian Laba

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilik (Baridwan , 1992:55).

Laba bersih adalah laba yang didapatkan setelah dikurangi pajak. Lebih detailnya laba ini adalah keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi pajak. Selain itu, ada yang menyebutkan laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Pasa intinya penggunaan istilah tersebut untuk memperjelas darimana laba tersebut diperoleh. Misalnya, pada istilah laba sebelum bunga dan pajak, laba ini diperoleh dari hasil keuntungan sebelum dikurangi biaya bunga dan pajak. Istilah-istilah yang berbeda ini sangat membantu para manajer dan investor untuk menentukan keputusan bisnis kedepannya melalui berbagai perhitungan rasio keuangan. Laba ini dihitung berdasarkan transaksi yang benar terjadi pada periode tertentu. Laba diperoleh dari aktivitas usaha seperti jual beli barang titik dalam sektor perdagangan, keuntungan disebut laba titik sedangkan sektor investasi keuntungan lebih dikenal dengan nama profil.

Menurutku Kuswadi (2005) secara sederhana mendefinisikan laba (rugi) adalah pendapatan dikurangi seluruh beban atau biaya yang telah dikeluarkan, Sebagaimana terlihat dalam persamaan laba (rugi) di bawah ini.

$$\text{Laba (Rugi)} = \text{Pendapatan} - \text{Beban/Biaya}$$

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih kenaikan manfaat ekonomi/ pendapatan setelah dikurangi seluruh beban sehubungan dengan kegiatan usaha selama satu periode akuntansi.

2.8. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yaitu sebuah langkah awal dalam manajemen pajak atau bisa juga diartikan sebuah sarana untuk memenuhi suatu kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (teks implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan Penelitian terhadap

peraturan perpajakan tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Manajemen perpajakan yang ekonomis efisien dan efektif untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan titik Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, Apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, Apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda titik pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis dapat diterima, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

Aspek-aspek dalam perencanaan pajak

Aspek formal dan administratif

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPWP);
- b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- c. Memotong dan garis miring atau memungut pajak;
- d. Membayar pajak;
- e. Menyampaikan surat pemberitahuan.

Aspek material

Basis perhitungan pajak adalah objek pajak titik dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan

pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Tahapan perencanaan pajak

- a. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or more possible tax plans)
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plans)
- e. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan) strategi umum perencanaan pajak.

a. Tax Saving

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah titik misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21.

c. Menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

Sanksi administrasi:, bunga, atau kenaikan;

Sanksi pidana: pidana atau kurungan

Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

- d. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
- e. Mengoptimalkan Kredit Pajak Yang Diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa.

2.9. Hipotesis Penelitian

2.9.1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Palepu, Healy, Bernard (2003), dalam Dechow dan Schrand (2004), menginvestigasi perbedaan laba menurut akuntansi dan perpajakan yang menjadi indikator dari persistensi akrual, arus kas, dan laba. Hawkins (1998), menyatakan semakin besar presentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan yang memakai standar akuntansi yang semakin liberal. Yulianti (2005) menambahkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Signalling theory menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh seorang investor dipasar modal sebagai alat analisis untuk waktu mengambil keputusan investasi.

H1: Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Dalam Mendeteksi Manajemen Laba

2.9.2. Pengaruh beban pajak kini terhadap manajemen laba

Beban pajak kini adalah beban yang harus ditanggung perusahaan pada tahun berjalan, yang ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana disampaikan dalam SPT pajak penghasilan badan titik beban pajak ini disebut dengan istilah "beban pajak kini" yang dihitung menggunakan tarif pajak efektif dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang taxable yang diperoleh dari laporan keuangan komersial atau laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal (marisi,2009:11)

Laba fiskal untuk wajib pajak badan adalah laba kena pajak (Djoko dan Baruni, 2009:106). Dengan demikian diperoleh beban pajak kini dari Perkalian antara tarif pajak yang berlaku dengan laba kena pajak suatu perusahaan atau badan. Dalam beberapa hal wajib pajak mempunyai kebebasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penentuan saat pengakuan pendapatan dan biaya, meskipun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan harus diterapkan secara taat asas atau konsisten dari tahun ke tahun (Lindira dan Ketut, 2014:251). Inilah yang menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba, menaikkan dan menurunkan laba perusahaan melalui pengakuan pendapatan dan beban:

H2: Beban Pajak Kini Berpengaruh Dalam Mendeteksi Manajemen Laba.

2.9.3. Pengaruh perencanaan pajak dalam mendeteksi manajemen laba

Beban pajak tangguhan digunakan untuk mendeteksi manajemen laba karena adanya komponen-komponen beban pajak tangguhan yang dapat digunakan dalam tindakan manajemen laba oleh perusahaan. Salah satu cara beban pajak tangguhan untuk menghindari kerugian atau untuk meningkatkan angka laba seperti total perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih yang merupakan cerminan dari beban pajak tangguhan yang tercantum dalam laporan laba rugi, kecuali terkait dengan peristiwa merger, acquisition, divestiture dan other comprehensive income items menurut Yulianti (2005) menyatakan semakin besar perbedaan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan harus berhati-hati dalam penggunaan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan dikasikan kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba.

H3: Perencanaan Pajak Berpengaruh Dalam Mendeteksi Manajemen Laba

2.10. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andro Trijovianto (2008)	Pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dalam mendeteksi manajemen laba	Variabel Bebas: X1 : Beban pajak tangguhan X2 : Perencanaan pajak Variabel terikat : Y : Manajemen laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba untuk menghindari kerugian
2	Tertiarto Wahyudi & Ahmad Subekti (2018)	Analisis Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba	Variabel Bebas: X1 : Perencanaan pajak (Tax planning) X2 : Perencanaan Pajak (Deferred tax expense) Variabel terikat: Y : Manajemen laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba beban pajak tangguhan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba perencanaan pajak dan

				beban pajak tangguhan secara simultan dan signifikan terhadap manajemen laba.
3	Vincent Junery (2016)	Pengaruh beban pajak tangguhan Pajak kini dan kompensasi manajemen terhadap manajemen laba	Variabel bebas: X1 : Beban pajak tangguhan X2 : Beban Pajak Kini X3 : Kompensasi manajemen terhadap Variabel terikat : Y : Manajemen laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen laba.
4	Aulia Rahmi, et. al (2019)	Pengaruh pajak tangguhan Pajak ini dan perencanaan pajak dalam mendeteksi manajemen laba	Variabel bebas: X1 : Beban pajak tangguhan X2 : Pajak kini X3 : Perencanaan Pajak terhadap Variabel terikat : Y : Manajemen laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh beban pajak, kini tidak berpengaruh, dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap

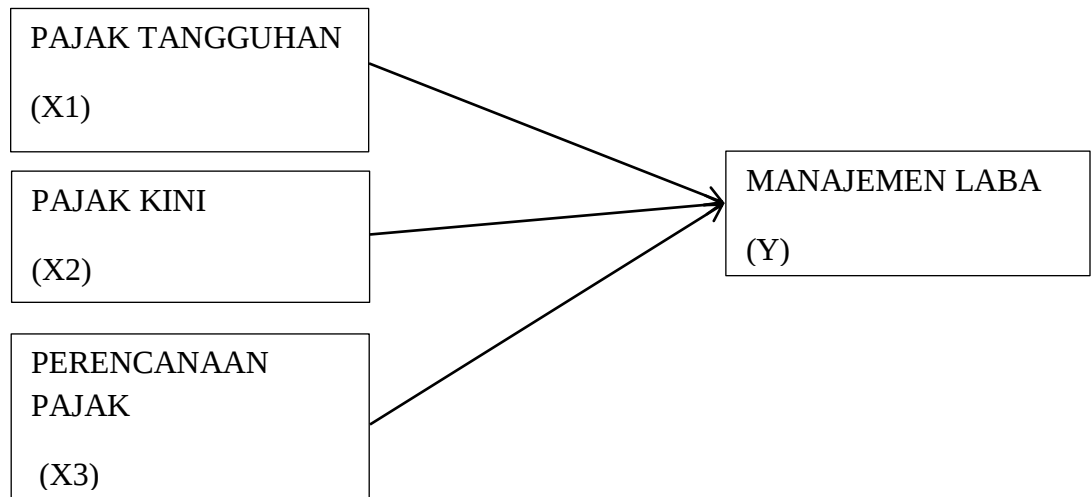
				manajemen laba.
5	Marista Winanti Sutadipraja et. al (2019)	Pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, liabilitas Pajak tangguhan terhadap manajemen laba	Variabel bebas: X1 : Beban pajak kini X2 : Beban paja tangguhan X3 : Aset pajak tangguhan X4 : Liabilitas Pajak tangguhan Variabel terikat : Y : Manajemen laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diduga terdapat pengaruh beban pajak kini beban pajak tangguhan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
6	Novi Catur et. al (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba	Variabel Bebas: X1: Perencanaan Pajak X2: Beban Pajak Tangguhan X3: Kualitas Audit Variabel terikat: Y: Manajemen Laba	Hasil penelitan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh perencanaan pajak beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba
7	Andro Trijovianto	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap	Variable bebas: X1: Beban Pajak Tangguhan X2 : Beban	Hasil Beban pajak tanggungan dalam penelitian ini tidak dapat

		Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa Dan Investasi Di Bursa Efek Indonesia)	Pajak Kini X3: Perencanaan Pajak Variable terikat: Y: Manajemen laba	mendeteksi manajemen laba Perencanaan pajak dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap perusahaan melakukan manajemen laba
8	Fadhila et. al	Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (The Effect of Current Tax Expense, Deffered Tax Expense and Deffered Tax Asset on Earnings Management)	Variabel bebas: X1: Beban Pajak Kini X2: Beban pajak tangguhan X3: Tangguhan Aset Variable terikat : Y : Manajemen Laba	Hasil Beban pajak kini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba
	Ferry Aditama Anna Purnawiningsi	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Variable bebas: X1: Perencanaan Pajak Variabel terikat Y: Manajemen	Hasil perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif

		Indonesia	Laba	terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.
--	--	-----------	------	--

2.11. Model Penelitian

Kerangka pikir adalah sebuah konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan factor-factor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian.



Gambar 2.1

Model Penelitian

Sumber: Penulis, 2020